



Media Title	KOMPAS		
Head Line	Tanah Belum Tuntas		
Date	20 Nov 2013	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	21	Article Size	
Journalist	Rek	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

Tanah Belum Tuntas

Pembebasan Lahan Tol Cikopo-Palimanan Sudah 97 Persen

CIREBON, KOMPAS – Pembebasan lahan untuk Tol Cikopo-Palimanan masih terkendala di wilayah Cirebon, Jawa Barat. Ada 13 keluarga yang masih bertahan di kawasan yang akan dibangun tol. Padahal, tanah itu sudah harus diserahkan kepada konsorsium gabungan Malaysia-Indonesia selaku investor pada Januari 2014.

Ketua Tim Pengadaan Tanah (TPT) Tol Cikopo-Palimanan Eten Roseli, Selasa (19/11), mengatakan, penyerahan tanah kepada investor tidak boleh terlambat. "Sebulan saja kami terlambat, negara bisa dikenai denda Rp 125 miliar," kata Eten.

Kepada warga yang masih keberatan atas nilai ganti rugi tanah, dia menyarankan segera menyelesaikannya melalui pengadilan. Dari total 8.000 keluarga

yang rumah dan tanahnya terkena proyek Tol Cikopo-Palimanan, ada 13 keluarga yang hingga kini menolak ganti rugi.

Sebaliknya, kuasa hukum warga, Agus Prayoga, memilih tetap pada pendirian awal untuk meminta penilaian ulang atas tanah dan bangunan yang terkena proyek jalan tersebut. Harga ganti rugi yang ditetapkan pemerintah dinilai terlalu rendah karena didasarkan pada surat keputusan

bupati Cirebon tahun 2005. Setiap meter persegi tanah dihargai Rp 200.000-Rp 400.000. Tinggi rendahnya harga tanah disesuaikan dengan lokasi dan posisi tanah terhadap jalan raya.

"Nilai ganti rugi itu sudah tidak sesuai karena menggunakan ukuran tahun 2005. Pembayaran dilakukan pada tahun 2011, yakni saat nilai tanah dan bangunan seharusnya lebih tinggi daripada tahun 2005, apalagi sekarang sudah tahun 2013. Minimal dihargai Rp 600.000-Rp 1 juta per meter persegi," kata Agus.

Warga akan bertahan di bangunan dan tanah mereka sampai ada keputusan presiden mengenai pencabutan hak tinggal. Menurut Agus, tanah dan bangunan warga bisa dikosongkan, tetapi harus seizin presiden. Sebab, hanya presiden yang bisa

mengeluarkan pencabutan hak tinggal terhadap warga negara.

Ada lima kabupaten yang wilayahnya terkena proyek tol tersebut, yakni Purwakarta, Subang, Majalengka, Indramayu, dan Cirebon. Namun, dari kelima daerah itu, persoalan terbesar dihadapi di Cirebon.

"Total panjang lahan yang kami perlukan di Cirebon ialah 7 kilometer. Lahan itu akan dipakai untuk pintu masuk dan keluar kendaraan dari dan menuju Cirebon," kata Eten.

Saat ini, TPT Tol Cikopo-Palimanan mengklaim sudah membebaskan 97 persen lahan. Pemerintah menyiapkan dana Rp 7 miliar untuk pembebasan lahan yang masih bermasalah di Cirebon. Total nilai proyek tol ini ditaksir sebesar Rp 12,5 triliun.

(REK)